

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi keuangan suatu perusahaan tentang transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dalam suatu periode akuntansi yaitu tahun buku suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan adanya pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai perusahaan kepada investor, kreditor dalam pengambilan keputusan (Kieso, Weygandt, Warfield, 2011:7). Pihak investor menggunakan laporan keuangan untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Sedangkan pihak kreditor, akan menggunakan laporan keuangan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan apakah akan memberikan kredit atau tidak.

BEI sendiri pada dasarnya juga telah mengatur mengenai ketentuan tentang keterbukaan informasi di pasar modal yang dituangkan dalam peraturan BEI yaitu Peraturan Pencatatan No I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban penyampaian informasi. Peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemodal atau investor agar memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait kondisi perusahaan yang tidak lain

peraturan tersebut ditujukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan investor di bursa.

Asimetri informasi adalah suatu situasi dimana pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor. Asimetri informasi adalah Salah satu faktor yang menyebabkan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Manipulasi laporan keuangan yang sering dilakukan adalah membesar-besarkan laba. Karena laba dapat menjadi suatu tolak ukur kinerja operasional perusahaan dan menjadi perhatian para pengguna laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Ada pula faktor pendukung adanya manipulasi laporan keuangan, yaitu penilaian kerja manajemen dan pemberian bonus. Disamping itu, bahwa kinerja operasional suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sehingga hal tersebut memancing para manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Konservatisme merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan (Haniati dan Fitriany, 2010).

Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 (SFAC 2) dalam Lasdi (2011), konservatisme akuntansi merupakan sebuah konsep yang mendasari pengukuran akuntansi dan prinsip dalam akuntansi yang membatasi optimisme berlebihan dalam pelaporan kinerja perusahaan. Pengadopsian International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai pedoman penyusunan laporan

keuangan di seluruh dunia merupakan perwujudan adanya penolakan dan kritik terhadap prinsip konservatisme. Karena prinsip yang digunakan dalam IFRS yaitu *fair value* tidak sejalan dengan prinsip konservatisme. Konservatisme lebih menekankan pada reabilitas, yang mana bertentangan dengan prinsip *fair value* yang lebih menekankan pada relevansi (Suwardjono, 2010).

Kepemilikan manajerial digunakan karena manajemen memiliki rasa sensitif terhadap pengaruh pemegang saham yang akan mempengaruhi pula kepada tingkat kontrol kepemilikan manajemen. Kepemilikan institusional merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi para manajer untuk menerapkan kebijakan konservatisme sehingga tercipta pengelolaan perusahaan yang efektif. Konservatisme, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah mekanisme corporate governance utama yang membantu mengatasi masalah keagenan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan membantu mengatasi permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka mereka akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan termotivasi untuk lebih giat dan juga dapat memajukan visi perusahaan. Tetapi, manajemen di lain sisi akan menyelaraskan oleh kepentingan-kepentingannya dengan kepentingan perusahaan.

Hasil pengujian lainnya menunjukkan faktor-faktor lain terhadap asimetri informasi. (Vidyatami, 2016) mengungkapkan bahwa frekuensi pelaporan keuangan intrim terhadap pelaporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap asimetri informasi memiliki peran untuk mencegah terjadinya moral hazard. Dengan penyampaian informasi secara berkala, dapat mengurangi

kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi informasi. Pelaporan keuangan berkala dilakukan setiap periode interim atau sebagai periode kumulatif sampai dengan tanggal tersebut yang memiliki keunggulan bersifat tepat waktu dan prediktif. Kemampuan tersebut dapat membantu pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat serta menyediakan informasi yang relevan.

Fauzi (2016) menjelaskan pada penelitiannya bahwa faktor lain mempengaruhi asimetri informasi adalah *integrated report*. Hal tersebut berpengaruh negatif secara langsung, artinya semakin tinggi pengungkapan *integrated report* akan mengurangi asimetri informasi. Integrasi informasi mencakup informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Laporan tahunan dan laporan berkelanjutan diintegrasikan dalam suatu laporan tunggal yang disebut *integrated report* (Accles & Krzus, 2010).

(Nessi, 2014) pengaruh volatilitas penjualan dan kinerja laba terhadap informasi asimetri melalui kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas penjualan tidak signifikan tetapi mempunyai arah positif terhadap informasi asimetri melalui kualitas pelaporan keuangan dan kinerja laba tidak signifikan tetapi mempunyai arah negatif terhadap informasi asimetri melalui kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan bagi kepentingan internal dan eksternal, terutama bagi investor dan kreditor. Pihak-pihak tersebut membutuhkan suatu informasi tentang perusahaan maupun informasi penghubung antara keduanya.

Dalam prakteknya, masih terjadi informasi asimetri yaitu ketidakseimbangan informasi antara manajer sebagai penyedia informasi dengan investor sebagai pengguna informasi. Penyebab informasi asimetri tersebut adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang menyebabkan informasi asimetri adalah volatilitas penjualan dan kinerja laba. Informasi asimetri akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan operasional pasar. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi informasi asimetri. Kualitas pelaporan keuangan yang berkualitas akan mengurangi informasi asimetri.

Aji dan Gede (2014) memperoleh hasil temuan bahwa variabel *audit tenure* memiliki pengaruh negatif pada asimetri informasi, sementara keberadaan komite audit terbukti mampu memperlemah pengaruh negatif *audit tenure* pada asimetri informasi. Keberadaan komite audit sebagai variabel moderasi terbukti memperlemah pengaruh negatif *audit tenure* pada asimetri informasi. Keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan terbukti telah mampu mengurangi efek asimetri informasi yang muncul ketika *audit tenure* dibatasi melalui regulasi pemerintah. Keberadaan komite audit tersebut dapat dikatakan mampu memastikan efektivitas peran dan fungsinya terkait proses pengawasan pelaporan keuangan.

Pengaruh negatif *audit tenure* pada asimetri informasi yang ditunjukkan oleh Primadita (2012) berupaya menjelaskan bahwa ketika *audit tenure* yang dibatasi maksimal selama enam tahun berturut-turut untuk KAP tersebut akan membawa dampak pada tingginya asimetri informasi di awal perikatan audit. Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut auditor harus mampu menyelesaikan tugas

auditnya, sementara ada kemungkinan bahwa auditor belum mengetahui informasi dan prospek perusahaan klien. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya potensi kegagalan audit sebagai dampak diberlakukannya kebijakan tersebut, Untuk itu, kecenderungan yang terjadi ialah bahwa klien memberikan informasi awal mengenai kondisi perusahaannya.

Analisis yang dilakukan Rocky (2016) menunjukkan bahwa audit tenure dan kualitas audit terus berlanjut secara signifikan berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Selain itu juga memasukan faktor-faktor lain yaitu dari ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi dan juga Komite audit sebagai Variabel moderasi menunjukkan pengaruh kuat pada hubungan Audit tenure dengan informasi asimetri.

Aspek lain terkait dengan skandal-skandal keuangan yang terjadi ialah penerapan *good corporate governance*. Asimetri informasi yang timbul diduga terjadi karena lemahnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan. Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan membantu pihak prinsipal untuk membatasi perilaku oportunistik manajer sehingga mampu mengurangi biaya keagenan (Connelly et al., 2012). Salah satu aspek *good corporate governance* yang masih sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan ialah keberadaan komite audit. Terungkapnya skandal manipulasi keuangan perusahaan termuka tahun-tahun belakangan ini telah membuka pertanyaan lebih jauh mengenai efektifitas komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Tugas komite audit berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena peran utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan laporan keuangan oleh manajemen. Dengan demikian, komite audit memegang peranan sangat penting dalam mekanisme pengendalian internal perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit harus mampu menyediakan informasi yang andal dan akurat serta diarahkan untuk mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer.

Faktor lainnya yang diteliti dalam penelitian kali ini adalah pengaruh auditor spesialis dalam meminimalisasi terjadinya informasi asimetri. seorang auditor spesialis terbukti dapat mengurangi tingkat asimetri informasi yang terjadi di perusahaan (Indira & Fitriany 2014). Pengukuran auditor spesialis penelitian ini mengikuti pengukuran pada penelitian yang dilakukan oleh Gul, Fung, dan Jaggi (2009), dimana auditor spesialis diidentifikasi dengan melihat pangsa pasar (*market share*) berdasarkan total aset perusahaan yang diaudit oleh suatu KAP pada suatu industri tertentu. KAP dengan persentase pangsa pasar total aset yang paling tinggi di suatu industri ditentukan sebagai spesialis pada industri tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yanuar (2014) menunjukkan hasil bahwa konservatisme berpengaruh terhadap asimetri informasi. Sedangkan relevansi nilai dan ketepatanwaktuan tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Hubungan relevansi nilai laba dan asimetri informasi dapat di jelaskan melalui teori agensi, dimana hubungan ini dapat dilihat dari seorang manajer (*agent*) yang memiliki informasi lebih banyak mengenai keadaan perusahaan yang dapat dilihat melalui relevansi nilai laba. Sedangkan pemegang saham (*principal*) membutuhkan

informasi, dan hanya memiliki sedikit akses terhadap informasi tersebut. Karena adanya perbedaan kepentingan diantara agent dan principal maka muncul masalah agensi, dalam hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi. Berhubungan dengan kecenderungan manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, maka Lafond dan Watts (2006) berpendapat bahwa konservatisme merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk melakukan manipulasi dan overstatement laporan keuangan, terutama mengenai kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan arus kas dan nilai perusahaan.

Ketepatanwaktuan penyajian informasi keuangan salah satu unsur penting yang dapat memberi manfaat bagi para investor dalam pembuatan keputusan investasi. Namun dalam beberapa riset, ketepatanwaktuan justru sering dilupakan dalam penelitian berkaitan dengan kerelevanan suatu informasi keuangan (Wirakusuma 2008).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Nova (2012) diketahui bahwa variabel konservatisme tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dan tidak dapat digunakan sebagai variabel moderat antara konservatisme dan asimetri informasi. Pada variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan tidak dapat digunakan sebagai variabel moderat hubungan antara konservatisme asimetri informasi. Penelitian ini akan memasukkan mekanisme internal spesifik perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Untuk internal spesifik perusahaan yang akan digunakan adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan

manajerial yang digunakan karena manajemen memiliki rasa sensitif terhadap pengaruh pemegang saham yang akan mempengaruhi pula kepada tingkat kontrol kepemilikan manajemen. Kepemilikan institusional merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi para manajer untuk menerapkan kebijakan konservatisme sehingga tercipta pengelolaan perusahaan yang efektif.

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Reyther (2013) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Variabel kontrol *price* dan *size* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi. Hasil ini mendukung sepenuhnya teori agensi. Prinsipal dengan kepemilikan saham yang tinggi memiliki hak kontrol atas manajer agar tidak bersikap oportunistik. Kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi.

Adanya hasil penelitian yang berbeda di kalangan para peneliti, maka penelitian ini menggunakan unsur kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang terkandung dalam *corporate governance* untuk memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investors/minority shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan para manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal. Wardhani (2006) dalam Reyther (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit mendorong penggunaan konservatisme akuntansi dengan metode akrual.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2011) yang juga membahas tentang krisis finansial global dan membahas juga tentang komisaris independen menunjukkan bahwa *corporate governance* yang di representasikan dengan komposisi komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi selama berlangsungnya krisis finansial global. Selain itu pengungkapan sukarela memiliki pengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Peningkatan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan mampu menurunkan tingkat asimetri informasi selama krisis finansial global. Periode krisis juga diduga mempengaruhi hubungan kepemilikan manajerial dengan asimetri informasi.

Manajer yang sebagai pihak yang di beri kepercayaan menjalankan perusahaan akan berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya terutama selama krisis terjadi. Manjer juga harus mempertahankan nilai positif perusahaan meskipun perusahaan dalam kondisi yang tidak stabil. Periode krisis yang di amati oleh Shon Weiss (2009) adalah krisis yang terjadi di amerika serikan akibat peristiwa 11 september 2001 terhadap perusahaan investasi yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela di perusahaan. Pada penelitian Shon dan Weiss (2009) juga menemukan bahwa pengungkapan sukarela pada saat krisis berlangsung tidak memiliki pengaruh terhadap *bid-ask spread* perusahaan.

Dalam penelitian yang di lakukan Arko (2014) membahas 6 variable yaitu Corporate Governance Perception Index dan proporsi komisaris independen yang berpengaruh negatif signifikan. Ukuran dewan komisaris, ukuran direksi, dan

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh dengan arah positif. Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa penerapan corporate governance yang diantaranya meliputi pengawasan telah dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Pengawasan yang baik berarti informasi yang diungkapkan oleh perusahaan juga ikut meningkat sehingga asimetri informasi dapat dikurangi. Berdasarkan teori keagenan, untuk meminimalkan masalah yang timbul akibat asimetri informasi sekaligus menjembatani kepentingan pemilik dan manajemen, Dewan Komisaris dituntut untuk dapat memberikan informasi dan melakukan pengawasan secara efektif.

Klein (2001) dalam Kanagaretnam, et al (2007) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar merupakan pengendali manajemen yang efektif. Sehingga manajer tidak mempunyai kesempatan untuk bertindak oportunistik dengan menyembunyikan informasi material terkait kondisi perusahaan. Teori keagenan menilai bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Perusahaan memandang pentingnya komisaris independen dalam peningkatan kualitas informasi yang didapat investor. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen.

Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Jensen dan Meckling

(1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Semua emiten yang tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, yang diberi nama JASICA (*Jakarta Industrial Classification*). Sektor industri barang konsumsi adalah salah satu bagian dari sembilan sektor tersebut. Sektor industri barang konsumsi adalah salah satu bagian dari sembilan sektor tersebut (*Indonesia Stock Exchange, 2010*). Sektor industri barang konsumsi terdiri dari lima subsektor yaitu, makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, serta peralatan rumah tangga. Sektor industri barang konsumsi tercatat sebagai sektor yang mengalami pertumbuhan paling tajam di dalam indeks sektoral. Pertumbuhan industri barang konsumsi tersebut dipicu oleh meningkatnya kelas menengah masyarakat Indonesia yang diikuti pula oleh meningkatnya perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Ada beberapa nama emiten yang disinyalir ikut mendongkrak kinerja indeks sektor barang konsumsi secara signifikan antara lain PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) (Sitepu, 2010)

Kasus yang terjadi di Indonesia seperti PT Kimia Farma, Tbk. Dimana mantan direksi PT Kimia Farma, Tbk. telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (*mark up*) laba bersih di 5 laporan keuangan perusahaan milik Negara untuk tahun buku 2001. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggungjawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di-mark up ini, merupakan kesalahan manajemen lama. Terlepas dari kesalahan pencatatan itu disengaja atau tidak disengaja, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal karena rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Rekayasa yang dilakukan oleh manajer untuk mengubah angka laba merupakan fenomena yang logis karena keahliannya dalam menyusun informasi perusahaan dibanding pihak lain. Namun ini tidak sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan dimana laporan keuangan merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Untuk itu diperlukan pengungkapan yang layak baik dari sisi keuangan maupun

nonkeuangan (<https://davidparsaoran.wordpress.com/>) diakses pada minggu, 21:30). Amandemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan telah disahkan menjadi Amandemen PSAK 1 yang berisi tentang Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen. PSAK 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.(IAI 2015)

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang telah dilakukan oleh Reyther Biki (2013) yang mengkaji tentang pengaruh dari konservatisme yang di mederenisasi oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan insitusional. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah di sebabkan karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat menjerminkan pasar modal secara keseluruhan. Perusahaan manufaktur juga memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Konsevatisme, kepemilikan Manajerial dan kepemilikan Institusional terhadap Asimetri Informasi (pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Asimetri informasi adalah sal satu faktor yang menyebabkan manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan yang sering dilakukan adalah membesar-besarkan laba.
2. Konservatisme akuntansi merupakan sebuah konsep kehati-hatian yang mendasari pengukuran akuntansi dan prinsip dalam akuntansi yang membatasi optimisme berlebihan dalam pelaporan kinerja perusahaan. Pelaporan keuangan yang transparan namun juga memiliki batasan dalam penyajiannya.
3. Kepemilikan manajerial memiliki rasa sensitif terhadap pengaruh pemegang saham yang akan mempengaruhi pula kepada tingkat kontrol kepemilikan manajemen.
4. Kepemilikan institusional merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi para manajer untuk menerapkan kebijakan konservatisme sehingga tercipta pengelolaan perusahaan yang efektif.
5. frekuensi pelaporan keuangan intrim terhadap pelaporan keuangan memiliki peran untuk mencegah terjadinya moral hazard. Dengan penyampaian informasi secara berkala , dapat mengurangi kesempatan bagi menejemen untuk memanipulasi informasi.
6. *integrated report* adalah mekanisme dalam menyajikan informasi mengenai strategi, tata kelola, kinerja dan prospek yang berkaitan satu

dengan lainnya dalam suatu laporan tunggal dan mencakup informasi keuangan dan informasi non-keuangan. *Integrated report* berkontribusi dalam peningkatan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan

7. *audit tenure* yang dibatasi maksimal selama enam tahun berturut-turut untuk KAP tersebut akan membawa dampak pada tingginya asimetri informasi di awal perikatan audit.
8. ukuran dewan komisaris yang lebih besar merupakan pengendali manajemen yang efektif. Sehingga manajer tidak mempunyai kesempatan untuk bertindak oportunistik dengan menyembunyikan informasi material terkait kondisi perusahaan.
9. Ketepatanwaktuan penyajian informasi keuangan salah satu unsur penting yang dapat memberi manfaat bagi para investor dalam pembuatan keputusan investasi. Salah satu kendala perusahaan *go public* dalam pelaporan keuangan ke publik yaitu adanya ketepatan waktu. Jika terjadi penundaan pada pelaporan keuangan ke publik, maka informasi yang dihasilkan akan berkurang relevansinya.
10. *Corporate governance* yang baik akan memberikan implikasi tersajinya informasi yang lebih baik di masa krisis sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat asimetri informasi di pihak investor.
11. Peningkatan pengungkapan sukarela yang tinggi akan memperkecil kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik. Secara teoritis manajemen berusaha mengurangi asimetri informasi dengan melakukan pengungkapan yang luas guna mengurangi konflik kepentingan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun pembatasan masalah ini agar penelitian ini terfokus pada variabel – variabel yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan Asimetri Informasi sebagai variabel dependen. Konservatisme, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

D. Perumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Apakah konservatisme berpengaruh pada pengungkapan asimetri informasi ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada pengungkapan asimetri informasi?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada pengungkapan asimetri informasi ?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas kegunaan mendeteksi adanya asimetri informasi pada laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Sehingga dapat memberikan kabar baik bagi para investor yang ingin

melakukan investasi. Selain itu diharapkan penelitian ini juga bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai permasalahan perbedaan informasi (*Information Asymetry*) antara pihak prinsipal dan agen. Bagi calon investor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berinvestasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu regulator untuk mengetahui perusahaan yang mempunyai tingkat perlindungan investor agar mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan.

